

## Peran KIM Daerah Tertinggal dalam *Memana*ge Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar

Trisnani

Peneliti Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Surabaya  
Jln. Raya Ketajen No. 36, Gedangan, Sidoarjo  
tris010@kominfo.go.id

Diterima : 21 Februari 2017 | Direvisi : 12 Maret 2017 | Disetujui : 15 Maret 2017

### Abstrak

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KIM belum berperan sebab dalam mencari, mengumpulkan dan mengelola informasi hasilnya masih rendah dibawah rata-rata. Dikatakan masih rendah karena petugas KIM dalam mencari informasi belum maksimal, kategori berperan apabila diatas rata-rata 50% dalam mencari informasi. Pencarian Informasi yang dominan, informasi pendidikan dan kebudayaan, menjadi informasi yang penting dan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak di usia sekolah sebagai generasi penerus dan masa depan. Mengelola informasi untuk bahan diskusi dalam pertemuan KIM, Informasi yang penting dan perlu diketahui masyarakat, oleh petugas KIM dibagikan ke masyarakat, bisa melalui fasilitas yang ada seperti papan pengumuman, dan selebaran serta KIM sebagian besar belum memiliki usaha. Faktor yang menghambat untuk pengembangan KIM antarlain minimnya anggota KIM yang atif, sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggota KIM kurang memahami penyebaran informasi melalui internet, pendidikan SDM KIM yang masih rendah. kurangnya komunikasi antar pengurus, dana tidak cukup untuk operasional pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat.

**Kata kunci :** KIM daerah tertinggal, *memana*ge informasi, meningkatkan, pengetahuan dan keterampilan, masyarakat

### *The Role of Rural Areas KIM in Managing Information to Develop Local People Knowledge and Creativity*

#### Abstract

*The research revealed that KIM has not played its vital role in gathering managing information since the quality of the community performance could still be regarded as below the average for several reasons as follows: the role of KIM participants, in gathering information, is labelled as less active since active category requires 50% involvement, dominant information involving education and culture is demanded to be valuable to develop young generation knowledge as they are the agent of change, The management of information is aimed to : be a discussion topic during KIM meetings, be delivered to society through information boards and pamphlets, the majority of KIM participants have not established any entrepreneurship yet. The obstacles that slower the development of KIM are as follows: the small numbers of active KIM participants that take part in every of its programmes, the lack of media numbers in supporting its programmes, the low quality of KIM participants' comprehensive on the information delivery through internet, the low educational level of KIM participants, the lack of communication among participants, and f) the inadequate amount of funds in developing KIM.*

**Keywords:** *rural areas community information service (KIM), managing information, developing knowledge and creativity of local people*

## PENDAHULUAN

Pada masa departemen Penerangan masih jaya, dalam upaya menyebarluaskan informasi ke masyarakat pedesaan dan pengembangan media komunikasi yang dilakukan adalah perluasan jaringan media elektronik, penyebaran koran masuk desa (KMD) maupun pembentukan pusat penerangan masyarakat (puspenmas).

Pada tingkat desa/kelurahan, juru penerang (jupen) merupakan ujung tombak dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Kedudukan jupen hanya pada tingkat kecamatan dan jumlah mereka sangat terbatas, tidak sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang dibinanya, untuk menunjang pekerjaan tersebut jupen melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berfungsi sebagai agen pembaruan.

Melalui agen pembaruan ini, jupen dapat dengan mudah masuk kedalam kelompok-kelompok pada tingkat desa, bahkan pedusunan atau RW. Jupen memiliki mitra yang bernama Kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) merupakan lembaga swadaya masyarakat pada tingkat desa/kelurahan, Lembaga ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam membantu menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat., sesuai Keputusan Menteri Penerangan RI no: 110/KEP/MENPEN/1984, tentang Pedoman Umum Pembinaan Siaran Pedesaan Kelompencapir.

Selang 10 tahun kemudian, surat keputusan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan RI no : 193/ KEP/ MENPEN/ 1994, tentang pedoman Umum Pembinaan Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pemirsa (Kelompencapir). Menurut SK tersebut, pengertian kelompencapir adalah suatu kelompok masyarakat yang dibentuk atas kesadaran dan prakarsa sendiri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan media elektronik, media cetak, penerangan umum dan saluran komunikasi lainnya.

Dari berbagai penelitian, dapat ditarik benang merah keberhasilan kelompencapir dalam menciptakan tata informasi di tingkat desa/

kelurahan, sebagai penggerak dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, maka dengan dibubarkan Departemen Penerangan, tidak ada instansi lain yang membina kegiatan kelompencapir, sehingga pelan tapi pasti, peran kelompencapir semakin surut didalam masyarakat dan akhirnya mati.

Meskipun secara institusi, kelompencapir telah mati, Secara pribadi, keberadaan mereka masih dibutuhkan oleh masyarakat dan tetap menjadi rujukan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan. Ini menjadi dilema bagi pengurus kelompencapir, sebab mereka masih dituntut oleh masyarakat sekitarnya untuk menyebarluaskan informasi seperti dulu disaat kelompencapir masih jaya.

Keresahan yang dialami oleh tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan penyebarluasan informasi tersebut diapresiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Selanjutnya sebagai implementasi dari kebijakan tersebut dikeluarkannya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 08/Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Permen Kominfo No. 08 tahun 2010 tersebut dinyatakan bahwa lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi. Selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan bahwa lembaga komunikasi Perdesaan adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau sejenis lainnya, selanjutnya disingkat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Tujuan KIM antara lain:

1. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan

3. Meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung keberhasilan pembangunan

Selanjutnya peran KIM adalah *memanage* informasi yaitu mencari, mengumpulkan dan mengelola informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. (sumber : [panduan.kim.blogspot.co.id/2012/05/panduan.kim.html](http://panduan.kim.blogspot.co.id/2012/05/panduan.kim.html))

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 November 2015 menyebutkan bahwa sebanyak 32 ribu desa yang tersebar pada 122 kabupaten di Indonesia masuk kategori desa tertinggal.

Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam (6) kriteria dasar dan 27 indikator utama yaitu :

1. perekonomian masyarakat, dengan indikator utama persentase keluarga miskin dan konsumsi perkapita.
2. Sumber daya manusia, dengan indikator utama angka harapan hidup, rata - rata lama sekolah dan angka melek huruf.
3. Prasarana (infrastruktur) dengan indikator utama jumlah jalan dengan permukaan terluas aspal/beton, jalan diperkeras, jalan tanah, dan jalan lainnya, *persentase* pengguna listrik, telepon dan air bersih, jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan permanen, jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk, jumlah dokter/1000 penduduk, jumlah SD-SMP/1000 penduduk.
4. Kemampuan keuangan daerah dengan indikator utama celah fiskal.
5. Aksesibilitas dengan indikator utama rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten, jarak ke pelayanan pendidikan, jumlah desa dengan *akses* pelayanan kesehatan lebih besar dari 5 km dan
6. Karakteristik daerah dengan indikator utama persentase desa rawan gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya, persentase desa di kawasan lindung, desa

berlahan kritis, dan desa rawan konflik satu tahun terakhir.

Pembangunan daerah tertinggal ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah pemberdayaan KIM , sebab melalui KIM partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dalam mempercepat kepentingan tersebut.

Sebab di daerah tertinggal dalam mengakses informasi masih banyak kendala karena disamping sebagian besar masyarakatnya berpendidikan rendah, belum bisa memahami dalam mengakses informasi melalui internet juga sarana dan prasarana masih minim serta jauh dari lokasi akses internet.

Keberadaan KIM di daerah maju memang tidak ada kendala atau kalau ada hanya masalah kecil saja, sebab sarana dan prasarana serta fasilitas dalam mengakses informasi tersedia sebaliknya untuk daerah terpencil, banyak kendala yang harus dihadapi para pengurus KIM untuk menghidupkan dan menggerakkan KIM sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Sesuai dengan latar belakang masalah yang menekankan pada kesenjangan informasi di Indonesia terutama di daerah terpencil dan tertinggal maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kelompok Informasi Masyarakat Daerah Tertinggal dalam *Memanage* Informasi, yaitu mencari, mengumpulkan, mengelola informasi?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran KIM dalam pembangunan masyarakat daerah tertinggal di Jawa Timur?

Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui peran KIM daerah tertinggal dalam *memanage* informasi, yaitu mencari, mengumpulkan dan mengelola informasi sesuai dengan kebutuhannya. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran KIM dalam pembangunan masyarakat daerah Tertinggal di Jawa Timur

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran praktis tentang pemanfaatan KIM bagi kelompok masyarakat daerah tertinggal untuk memenuhi kebutuhan informasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal. Manfaat teoritis secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang informasi publik, khususnya tentang pembangunan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) daerah tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai media tata kelola informasi masyarakat daerah tertinggal dan pengembangan KIM daerah tertinggal.

### *Landasan Teori*

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Pola ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku seseorang adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Peran menurut Soekanto (2009: 212- 213) adalah proses dinamis kedudukan (status).

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas - tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya.

Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut

Levinson dalam Soekanto (2009:213) yang dikutip Trisnani (2014: 35) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Ahmadi (2007: 105) peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Misalnya: dalam lapangan perusahaan, peranan soaial dan pemimpin perusahaan ditentukan oleh pengharapan-pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin perusahaan.

Di dalam masalah peranan, sering dibedakan dalam peranan sosial dan peranan individual.

Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy, 1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat sebagai subyek.

Menurut Abdulsyani (2007: 94) Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Berbicara masalah peran KIM disini ada beberapa tugas yang dibebankan pada peran masing-masing pengurus karena KIM adalah kelompok informasi masyarakat yang sebetulnya mengemban tugas sosial namun demikian memiliki peran sendiri-sendiri seperti peran KIM didalam penelitian ini ada tiga bagian yakni mencari informasi, mengumpulkan informasi, mengelola informasi sesuai dengan kebutuhannya.

Pengurus KIM yakni ketua, sekretaris, bendahara, ada petugas pencari/mengumpulkan pengelola dan penyebaran informasi di bidang informasi, pengurus tersebut mempunyai peran masing-masing.

Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya sesuai norma-norma yang sudah disepakati maka seorang pejabat/pemimpin sudah dinyatakan berperanan dalam kelompok tersebut. Seperti KIM bisa dikatakan berperan dalam *memanage* informasi berarti KIM didalam bertugas mencari, mengumpulkan, mengelola dan mendesiminasikan informasi, bila berjalan dan berhasil sesuai dengan peran dan kebutuhannya maka KIM sudah berperan dalam menjalankan tugasnya.

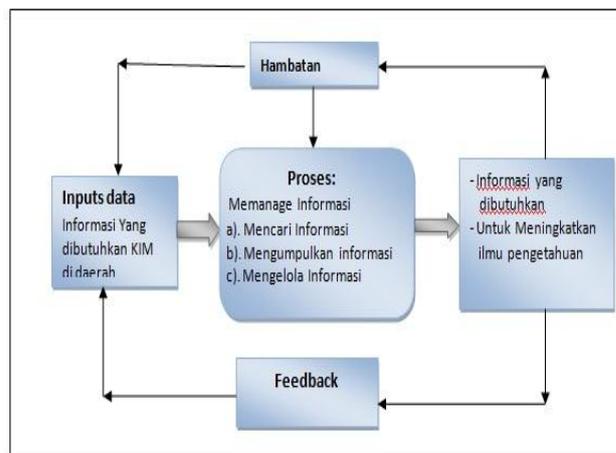
Hasil penelitian Agus Ansori Mudzakir dalam tesisnya yang berjudul Tingkat Partisipasi Anggota KIM terhadap Pengetahuan dan Inovasi di bidang usaha kecil (Home Industry) menyebutkan bahwa KIM yang berkembang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempunyai jaringan kerja sama dengan institusi terkait, memiliki kegiatan usaha yang lebih luas, mempunyai lebih banyak pelaksanaan program, dan memiliki kemampuan serta mempunyai akses yang mudah terhadap informasi dari berbagai sumber. Memiliki kemampuan untuk mengakses informasi, mendiskusikan dan mengimplementasikannya dalam berbagai macam kegiatan usaha

Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempunyai jaringan kerja sama dengan institusi terkait, memiliki kegiatan usaha yang lebih luas, mempunyai lebih banyak pelaksanaan program, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalannya secara mandiri.

Peran KIM sebagai media forum, kelompok informasi masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. setelah ada akses infrastruktur TI, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan TI meliputi diantaranya: Fasilitator informasi bagi masyarakat b. Mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi c. Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat d. Pelancaran arus informasi e. Faktor Pendukung Kelompok Informasi Masyarakat. ( Alfando 2013 : 115)

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian tersebut adalah KIM yang sudah berkembang namun

bagaimana untuk KIM di daerah tertinggal? Apakah juga mengalami hal yang sama atau sebaliknya dengan demikian maka dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat peran KIM di daerah tertinggal dengan menggunakan konsep dan teori peran sebagai berikut



Gambar 1. Diagram Alur Pikir Peran KIM di Daerah Tertinggal dalam *Memanager* Informasi

Apabila personal pengurus KIM baik dibidang *memanager* informasi, mediasi informasi, mengedukasi insan informasi, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka pengurus KIM sudah menjalankan suatu perannya. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan terkait bidang informasi. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya

*Memanager* Informasi ada 3 kategori KIM dikatakan berperan apabila 3 bidang/seksi melaksanakan tugasnya dengan baik.

- 1). Seksi mencari informasi melaksanakan tugasnya untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan
- 2). Seksi pengumpulan informasi melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi sesuai kebutuhan.
- 3). Seksi Pengelolaan informasi melaksanakan tugasnya dengan mengelola informasi sesuai kebutuhan
- 4). Faktor yang menjadi hambatan. Jadi di sini petugas mencari faktor apa saja yang menjadi hambatan .

Adapun indikator penentuan kategori tersebut dalam penelitian ini yaitu kategori berperan adalah apabila jumlah rata-rata responden melaksanakan tugasnya untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan yaitu lebih dari 50%.

- a. Kategori cukup berperan yaitu apabila jumlah rata-rata responden melaksanakan tugasnya untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan sama dengan 45 s/d 50%.
- b. Kategori tidak berperan yaitu apabila jumlah rata-rata responden melaksanakan tugasnya untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan kurang dari 45 %.

- 3. Bidang pengumpulan informasi : 1orang
- 4. Bidang pengelolaan informas : 1 orang
- 5. Bidang penyebaran informasi : 1 orang
- 6. Bidang usaha atau lainnya : 1 orang
- 7. Anggota KIM : 4 orang

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yakni berusaha menggambarkan realitas yang ada di lapangan secara rinci dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mengetahui lebih jauh fenomena yang terjadi, perlu dilakukan wawancara lebih dalam pada tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai narasumber.

*Lokasi penelitian*

Berdasarkan Perpres No 131 Th 2015 Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Untuk propinsi Jawa Timur sebagai berikut ([setkab.go.id/122-daerah.iniditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019](http://setkab.go.id/122-daerah.iniditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019)) :

- 1. Kabupaten. Bondowoso;
- 2. Kabupaten Situbondo;
- 3. Kabupaten Bangkalan;
- 4. Kabupaten Sampang.

*Populasi dan Sampel Penelitian*

Populasi penelitian ini adalah wilayah Jawa Timur semua kabupaten, penentuan sampel dilakukan secara purposive artinya ditentukan berdasarkan KIM yang ada di desa tertinggal, maka langkah pertama adalah mendatangi dan bertanya langsung kepada pejabat yang membawahi KIM pada Dinas Perhubungan dan Informatika atau dinas lain yang mengurus informatika pada masing-masing kabupaten. Setelah ditunjukkan KIM aktif di desa tertinggal, langkah selanjutnya adalah memilih tiga KIM dari beberapa KIM yang ada di desa tertinggal untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, dengan ketentuan satu kecamatan diwakili satu desa yang ada KIM aktif. Dengan demikian terpilih sebanyak 30 KIM di desa tertinggal.

Setelah mendapatkan KIM yang dimaksud, langkah berikutnya adalah memilih 10 orang sebagai responden dari masing-masing KIM. Berdasarkan struktur organisasi KIM, yang terdapat pada susunan pengurus. Berdasar struktur organisasi tersebut, maka ke-sepuluh responden terdiri dari:

- 1. Ketua KIM : 1 orang
- 2. Sekretaris/ bendahara : 1 orang

Berdasar uraian tersebut di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 120 responden dengan rincian jumlah kabupaten yang menjadi sampel adalah 4 kabupaten dan masing-masing kabupaten dipilih tiga KIM yang berada di desa tertinggal dan dari masing-masing KIM tersebut dipilih 10 orang responden.

*Teknik pengumpulan dan analisis data*

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara berstruktur kepada responden melalui daftar pertanyaan berupa kuesioner guna mendapatkan data lebih valid dan rinci.

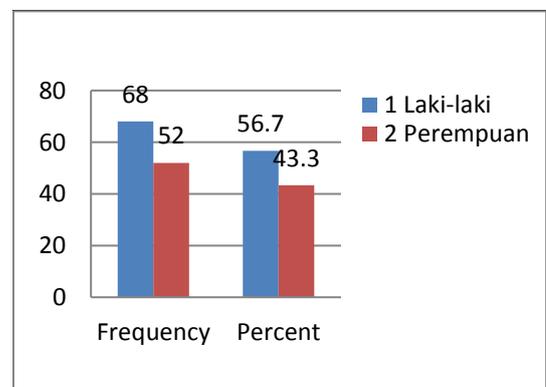
Data sekunder didapat dari pengumpulan literatur, baik buku, jurnal maupun surat keputusan atau yang lain terkait dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Teknik analisa data digunakan secara diskriptif kuantitatif. Data diolah dengan program SPSS 18 dan setelah diolah dikategorisasikan, kemudian disimpulkan. Untuk mendapatkan validitas dan reabilitas intrumen yang digunakan terlebih dahulu dilakukan uji coba (pre-test). Untuk memastikan apakah intrumen merupakan alat ukur teknik pengumpulan data.

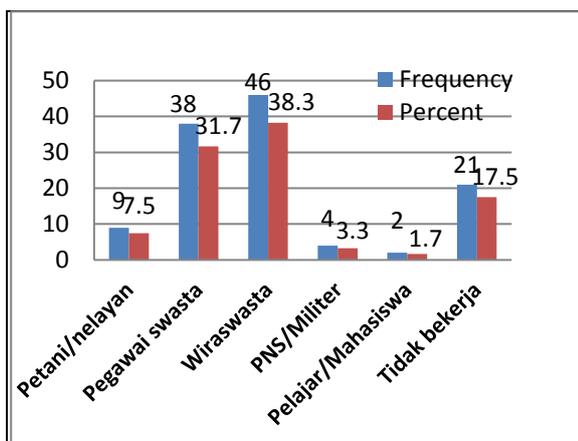
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Identitas Responden*

Penelitian ini mensurvei 120 responden dengan berjenis kelamin laki-laki sebesar, 52,0 %. Berjenis kelamin perempuan sebesar 43,3 % . Total sebesar 100,0 %.

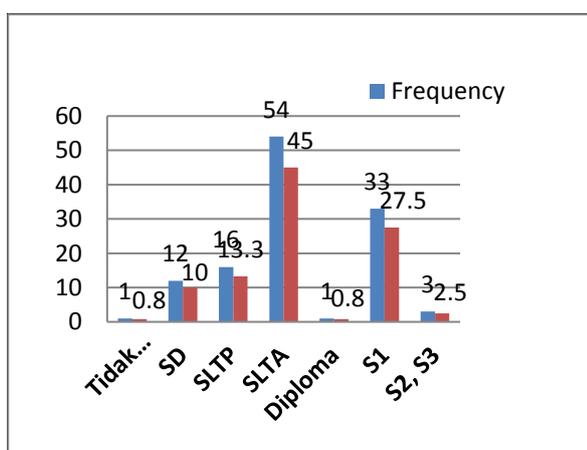


Gambar 2. Diagram Jenis Kelamin



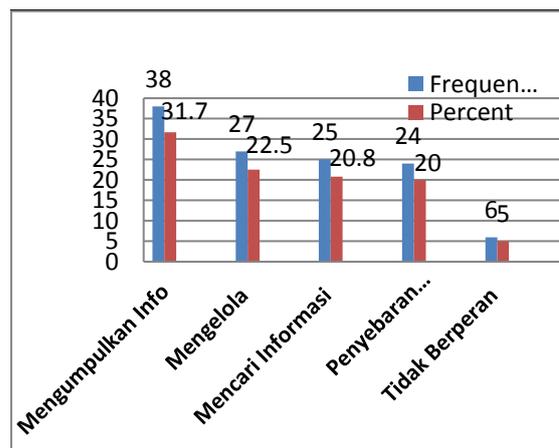
Gambar 3. Pekerjaan KIM

Pekerjaan Kelompok Informasi Masyarakat yakni sebagai petani/nelayan sebesar, 7,5 %. Pegawai/swasta 31,7 %. Wiraswasta sebesar, 38,3 %. Pegawai Negeri Sipil/Militer sebesar, 3,3 %. Sebagai pelajar/mahasiswa hanya 1,7 %. Tidak bekerja 17,5 %. Total sebesar 100,0%. Bila mengacu pada pekerjaan Kelompok Informasi Masyarakat yang paling banyak adalah Wiraswasta.



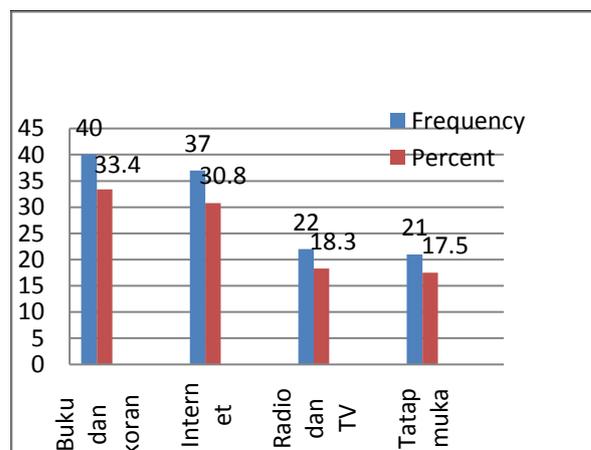
Gambar 4. Pendidikan KIM

Pendidikan Kelompok Informasi Masyarakat yakni; Tidak lulus SD hanya 0,8 %. Lulus SD sebesar, 10,0 %. SLTP sebesar, 13,3 %. SLTA sebesar, 45,0%. Diploma hanya 0,8 %. S1 sebesar, 27,5 %. S2 dan S3 hanya 2,5 %. Total 100,0 %. Jika melihat pendidikan kelompok informasi Masyarakat yang paling dominan adalah Pendidikan tingkat SLTA



Gambar 5. Peran KIM dalam Mencari Informasi

Gambar 5 menunjukkan bahwa peran KIM di Daerah Tertinggal dalam mengumpulkan informasi sebesar, 31,7 %. Petugas KIM yang berperan mengelola informasi sebesar 22,5 %. Petugas KIM yang berperan mencari informasi sebesar, 20,8 %. Petugas KIM yang berperan penyebaran informasi 20,0 %. Yang menyatakan tidak berperan hanya 5,0 %. Total 100,0 %. Peran KIM yang paling dominan adalah mengumpulkan informasi.

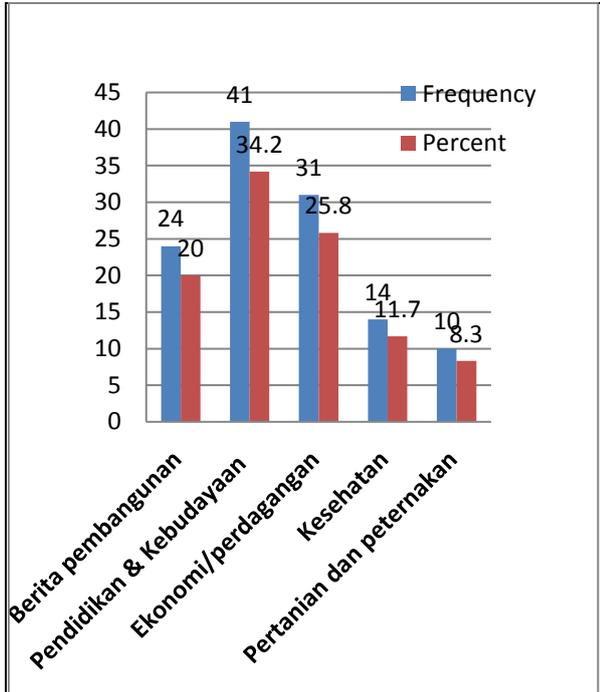


Gambar 6. Media yang digunakan untuk mencari informasi

Media yang digunakan untuk mencari informasi yakni; melalui Buku dan koran sebesar, 33,4 %. Melalui Internet sebesar, 30,8 %. Melalui radio dan Televisi sebesar, 18,3 %. Face to face sebesar, 17,5 %. Total sebesar 100,0 %. Mengacu pada media yang digunakan untuk mencari informasi oleh KIM, ternyata kelompok informasi masyarakat masih banyak yang membaca buku dan koran untuk mencari informasi yang dibutuhkan.

Peran KIM dalam Memana<sup>ge</sup> Informasi di Daerah Tertinggal

a. KIM dalam Mencari Informasi

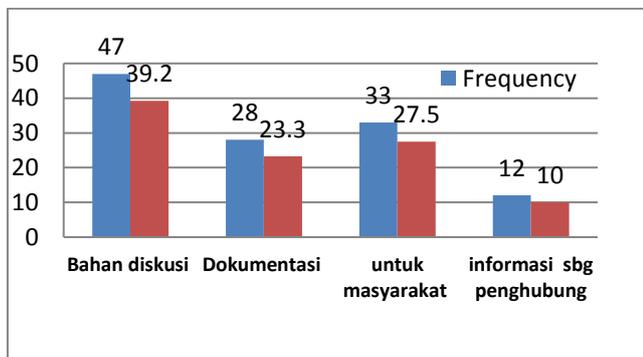


Gambar 7. Informasi Yang Dicari

Informasi yang dicari oleh Kelompok Informasi Masyarakat yakni; Berita pembangunan desa sebesar 20,0 %. Informasi Pendidikan dan Kebudayaan sebesar, 34,2 %. Informasi ekonomi perdagangan sebesar, 25,8 %. Informasi kesehatan sebesar, 11,7 %. Informasi pertanian dan peternakan sebesar, 8,3 %. Total 100,0 %.

Melihat pada gambar 7, ternyata informasi pendidikan dan kebudayaan masih menjadi informasi yang sangat penting dan dibutuhkan. Menurut ketua KIM Makmur Jaya, Moh Ridlai, bahwa informasi pendidikan sangat penting karena untuk perkembangan anak-anak dan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.

b. KIM dalam Mengumpulkan Informasi

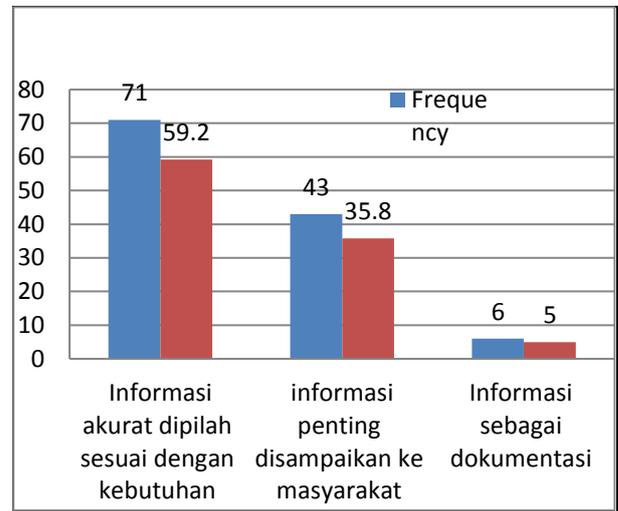


Gambar 8. Mengumpulkan Informasi

Manfaat Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mengumpulkan Informasi yakni; yang menyatakan sebagai bahan diskusi sebesar 39,2 %. Yang menyatakan untuk dokumentasi sebesar 23,3 %. Yang menyatakan mencari informasi yang dibutuhkan sebesar 27,5 %. Yang menyatakan sebagai editor sebesar 10,0 %. Total sebesar 100,0 %.

Jika mengacu pada grafik 7 yang dominan dalam mengumpulkan informasi sebagai bahan diskusi maksudnya informasi yang telah diperoleh dibahas dan informasi yang kiranya perlu diketahui masyarakat langsung disebarkan ke masyarakat, bisa melalui selebaran atau papan pengumuman yang ada di desa tersebut.

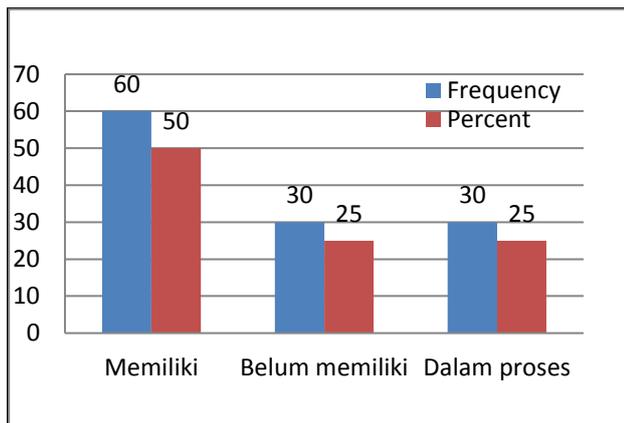
c. KIM dalam Mengelola Informasi



Gambar 9.. Peran KIM dalam Mengelola Informasi

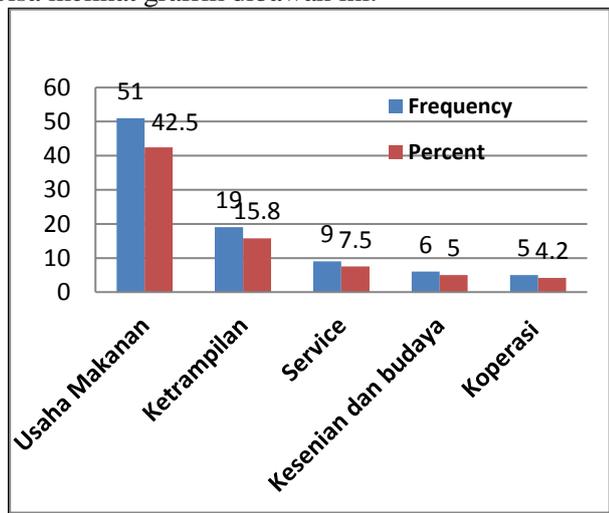
Peran Kelompok Informasi Masyarakat dalam mengelola informasi yakni; yang menyatakan Informasi yang akurat dipilah sesuai dengan kebutuhan sebesar, 59,2 %. Yang menyatakan informasi penting disampaikan kemasyarakat sebesar 35, 8 %. Yang menyatakan informasi sebagai dokumentasi sebesar 5, 0 %. Total sebesar 100,0 %.

Jika melihat pada grafik 8, peran KIM yang lebih dominan dalam mengelola informasi adalah klasifikasi kebutuhan informasi. Informasi yang penting segera disampaikan ke masyarakat, Hal ini sesuai dengan pendapat Moh Jafar sekretaris KIM Makmur Jaya desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan.”informasi yang sekiranya penting untuk masyarakat segera di sampaikan” seperti informasi pajak, informasi kebersihan, informasi kesehatan dll.



Gambar 10. Kepemilikan Bidang Usaha

Bidang usaha yang dimiliki KIM yaitu yang menyatakan memiliki sebesar 50,0 %. Yang menyatakan Belum memiliki sebesar 25,0 %. Yang menyatakan masih dalam proses sebesar 25 %. Sedangkan usaha yang dimiliki dan dikembangkan bisa melihat grafik dibawah ini.

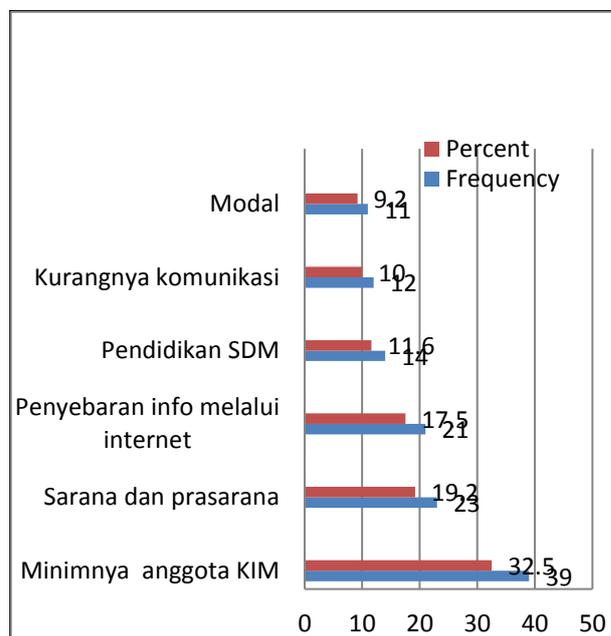


Gambar 11. Usaha yang dikembangkan

Bidang Usaha yang dimiliki dan dikembangkan yakni; yang menyatakan usaha makanan sebesar 42,5 %. Yang menyatakan usaha ketrampilan sebesar 15,8 %. Yang menyatakan usaha jasa service sebesar 7,5 %. Yang menyatakan usaha dibidang kesenian dan budaya sebesar 5,0 %. Yang menyatakan usaha koperasi sebesar 4,2 %.

Sedangkan dukungan dan bantuan dari pemerintah untuk KIM antara lain: Sosialisasi/pelatihan pekan KIM pernah dilakukan oleh pemerintah sebanyak 30 kali atau 25,0 %. Pelatiba membuat kue kering sebanyak 16 kali atau 13, 3 %. Bantuannya adalah peralatan masak sebanyak 10 barang atau 8,3 %. perangkat komputer sebanyak 10 buah atau 8,3 %. Warmasif sebanyak 10 atau 8,3 %.

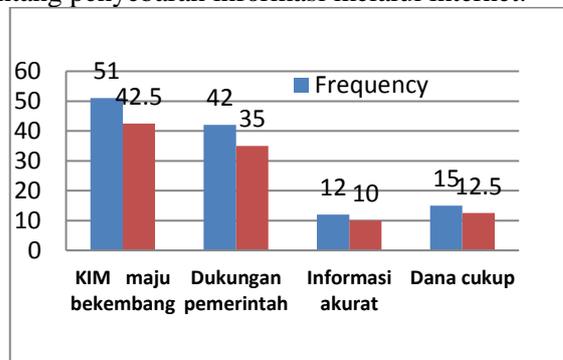
Faktor yang mempengaruhi peran KIM dalam pembangunan masyarakat daerah tertinggal di Jawa Timur bisa dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 12. Faktor yang menjadi hambatan

Faktor yang menjadi hambatan peran KIM daerah tertinggal adalah; Minimnya anggota KIM yang aktif sebesar 32,5 %. Sarana dan prasana sebesar 19,2 %. Anggota KIM kurang memahami penyebaran informasi melalui internet mencapai sebesar 17,5 %. Pendidikan SDM yang masih rendah sebesar 11,6 %. Kurangnya komunikasi antar anggota sebesar 10,0 %. Kurangnya modal sebesar 9,2 %.

Mengacu gambar 7 faktor yang dominan menjadi hambatan peran kelompok informasi masyarakat adalah minimnya anggota KIM yang aktif dalam kegiatan, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggota KIM kurang memahami tentang penyebaran informasi melalui internet.



Gambar 13. Harapan KIM kedepan

Harapan Kelompok Informasi Kedepan yakni; KIM bisa maju, berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat sebesar 42,5 %. Dukungan moril maupun materiil dari pihak pemerintah sebesar 35,0 %. Bisa menyebarkan informasi cepat dan akurat untuk masyarakat sebesar 10,0 %. Mengharapkan dana yang cukup untuk operasional KIM sebesar 12,5 %. Melihat harapan yang diinginkan oleh kelompok informasi masyarakat kedepan sangat optimis sekali, karena kebutuhan informasi untuk kepentingan masyarakat namun Kim juga mengharapkan dari bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah supaya KIM bisa eksis dan maju dan berkembang untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga masyarakat bisa menambah wawasan dan bisa mandiri.

## PEMBAHASAN

Penelitian Peran Kelompok Informasi Masyarakat dalam *Memmanage* Informasi di Daerah tertinggal, ada empat aspek yang akan dibahas yakni;

1. KIM dalam mencari informasi, ternyata informasi pendidikan dan kebudayaan masih menjadi informasi yang sangat penting dan dibutuhkan. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut ketua KIM Makmur Jaya, Moh Ridlai, 'bahwa informasi pendidikan sangat penting karena untuk perkembangan anak-anak usia sekolah dan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.
2. KIM dalam mengumpulkan informasi yang dominan sebagai bahan diskusi untuk menambah wawasan, informasi yang telah diperoleh dibahas dan informasi yang kiranya perlu diketahui masyarakat langsung disebarkan ke masyarakat, bisa melalui selebaran atau papan pengumuman yang ada di desa tersebut.
3. Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mengelola Informasi yang lebih dominan adalah klasifikasi kebutuhan informasi. Informasi yang penting segera disampaikan ke masyarakat, Hal ini sesuai dengan pendapat Moh Jafar sekretaris KIM Makmur Jaya desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kab. Bangkalan."informasi yang sekiranya penting untuk masyarakat segera di sampaikan" seperti informasi pajak, informasi kebersihan lingkungan, informasi kesehatan dll. Sekitar 50,0 % KIM tidak memiliki bidang usaha. Usaha yang paling banyak dikelola sebesar 42,5 %, usaha makanan dan ketrampilan
4. Faktor yang menjadi hambatan peran KIM daerah tertinggal adalah minimnya anggota KIM yang aktif dalam kegiatan. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Anggota KIM kurang memahami penyebaran informasi melalui internet.

Pendidikan SDM KIM yang masih rendah. Kurangnya komunikasi antar pengurus. dana tidak cukup untuk operasional pengembangan KIM

## KESIMPULAN

1. Peran kelompok informasi masyarakat dalam *memmanage* informasi di daerah tertinggal dikatakan belum berperan karena baik dalam mencari informasi, mengumpulkan informasi dan mengelola informasi belum memenuhi sesuai dengan kategori berperan, karena dikatakan berperan apabila sesuai dengan parameternya yakni; jumlah rata-rata KIM melaksanakan tugasnya untuk mencari informasi sesuai dengan kebutuhan yaitu lebih dari 50 %. Jadi Peran kelompok informasi masyarakat dalam *memmanage* informasi di daerah tertinggal dikatakan belum berperan sebab dalam mencari informasi, mengumpulkan informasi dan mengelola informasi, hasilnya masih rendah dibawah rata-rata yang ditentukan. (1) dikatakan masih rendah karena Petugas KIM dalam mencari informasi belum maksimal, kategori berperan apabila diatas rata-rata 50 % dalam mencari informasi. (2) Informasi yang terkumpul diolah, oleh Pengurus KIM dengan cara informasi yang diperoleh dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan. (3) Informasi yang penting dan perlu di ketahui kemasayarakat segera disampaikan, apalagi informasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat
2. Informasi yang dicari yakni; informasi pendidikan dan kebudayaan, menjadi informasi yang penting dan dibutuhkan untuk menambah pengetahuan anak-anak usia sekolah sebagai generasi/penerus bangsa di masyarakat daerah tertinggal. Dalam mengumpulkan informasi sebagai bahan diskusi dan informasi diperoleh dibahas dan kiranya perlu diketahui masyarakat langsung disebarkan ke masyarakat, melalui selebaran atau papan pengumuman yang ada di desa tersebut. Dalam pengelolaan informasi sekiranya informasi penting untuk masyarakat segera disampaikan ke masyarakat seperti informasi pajak, informasi kebersihan lingkungan, informasi kesehatan dll. Sekitar 50,0 % KIM belum memiliki usaha, selama ini usaha yang paling banyak dikelola usaha makanan dan ketrampilan
3. Faktor yang menjadi hambatan adalah minimnya anggota KIM yang aktif dalam kegiatan. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Anggota KIM kurang

memahami penyebaran informasi melalui internet. Pendidikan SDM KIM yang masih rendah. Kurangnya komunikasi antar pengurus. Dana tidak cukup untuk operasional pengembangan KIM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Abu. 2007. Psikologi Sosial, Edisi revisi PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Alfando W.S Johantan. 2013 eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, 2013: halaman 115.
- Castells, Manuel. 2002. *The Network Society: A Cross-cultural* Holden.
- Dijk, Jan A.G.M. van (2006). *The Network Society: Social Aspects of New Media*. Sage Publications.
- Soerjono Soekanto. 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru : Rajawali Pers. Jakarta
- Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019
- Sugiyono, 2010 Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D.
- Trisnani. 2014. JURNAL KOMUNIKA , Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika Vol 3, No. 1 April 2014 halaman 35
- Van Deursen, Alexander., Van Dijk, Jan. 2010. *Internet Skills and Digital Divide*. Journal New Media and Society.
- [setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019](http://setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019)
- [journal.ugm.ac.id/index.php/bip/article/view/8290](http://journal.ugm.ac.id/index.php/bip/article/view/8290)

|